KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : soal kunker fiktif anggota DPR, banteng yang mulai, banteng juga yang kaget
Tanggal : Minggu, 15 Mei 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Kunker Fiktif Anggota DPR

Banteng Yang Memulai Banteng Juga Yang Kaget

Fraksi PDIP kaget sendiri atas ramainya isu kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR. Fraksi Banteng di DPR tak pernah menyangka isu tersebut menjadi seheboh sekarang. Padahal, tujuan utama mereka memunculkan isu itu hanya sebagai langkah jaga-jaga agar anggotanya tertib dalam melaporkan hasil kunker.

ISU kunker fiktif ini mencuat setelah Fraksi PDIP membuat surat edaran bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/2016 tertanggal 10 Mei 2016, yang meminta para anggotanya membuat laporan lengkap pelaksanaan kurker. Dalam surat yang ditantangani Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto itu disebutkan, Sekjen DPR meragukan pelaksanaan kunker. Bahkan, disebutkan juga, berdasarkan audit BPK, ada pontensi kerugian negara atas kunker fiktif itu sebesar Rp 945 miliar.

Isu ini kemudian dikomentari banyak pihak. Bahkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ikut ngomong. Hampir semua komentar-komentar itu bernada negatif dan menyudutkan DPR. Gara-gara isu ini, fraksi-fraksi di DPR sampai harus susah payah membela diri.

Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengaku, fraksinya kaget atas kehebohan yang terjadi sekarang. "Ini kejutan. Kami tidak menyangka juga akan seramai ini," ucapnya, kemarin.

Menurut Hendrawan, surat edaran yang dikirimkan fraksinya dikhususkan untuk anggota PDIP. Surat itu sebagai langkah proaktif atas fotokopi surat yang didapat dari Sekjen DPR terkait audit BPK. PDIP ingin agar semua anggota fraksinya membuat laporan kunker dengan lengkap plus bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar tidak ada lagi perbedaan persepsi dengan kesetjenan DPR.

"Tujuan kami proaktif sekaligus preventif. Tapi, suratnya bocor sehingga menimbulkan kehebohan," ucapnya.

Karena sudah ramai, PDIP hanya bisa berharap isu itu jadi pelajaran berharga bagi semua anggota DPR. "Dengan kondisi sekarang, semoga bisa dijadikan momentum DPR untuk melakukan pembenahan ke dalam. Agar disiplin anggota jadi lebih baik termasuk dalam pelaporan."

Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani ikut memberikan klarifikasi. Dia menyatakan, potensi kerugian negara yang ada di dalam surat BPK hanyalah soal administrasi. Saat semua anggota DPR menyampaikan laporan kunkernya, potensi kerugian negara itu bakal turun.

Untuk itu, pihaknya terus mengumpulkan laporan kunker dari semua anggota. "Kita ngumpulin laporan-laporan anggota, supaya berkurang angka (keringan negara) yang teman-teman (media) rilis itu. Sudah banyak sekali anggota dewan yang melaporkan," ucapnya di Gedung DPR, kemarin.

Kata dia, sesuai Pasal 211 ayat 6 Tatib DPR, laporan kunker anggota DPR disampaikan ke fraksi masing-masing. Dari fraksi diserahkan ke Setjen DPR. Setjen kemudian menyerahkan ke BPK. Dengan adanya isu itu, jumlah laporan anggota DPR ke Setjen terus bertambah.

Jaring Asmara Demokrat

Menyikapi isu ini, Fraksi Demokrat memastikan semua anggotanya taat menjalankan kunker dengan baik. Sebab, sejak rapat pleno pertama pada Oktober 2014, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas telah menginstruksikan semua anggotanya untuk rajin turun ke masyarakat.

"Mas Ibas secara terus-menerus mengarahkan akan disiplin setiap anggota untuk taat jaring asmara (aspirasi rakyat) secara rutin. Turun secara fisik, terstruktur dan transparan, termasuk dalam membuat laporannya," jelas Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, kemarin.

Bagi Demokrat, menyerap aspirasi rakyat sangat penting. Dengan turun ke lapangan, Demokrat bisa merasakan langsung yang terjadi di tengah masyarakat. "Kami ingin memastikan secara utuh bahwa kebijakan di negara ini berpihak kepada kondisi dan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan konsep besar Fraksi Demokrat yaitu peduli, serap aspirasi, dan beri solusi. Maka segenap anggota wajib melaksanakan itu dalam setiap kegiatan reses," terangnya. ■ ONI/USU